PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP AKTIVITAS KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Alexander Dany Jikwa
NPP 33.1079
Program Studi Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat
Email: xanderalex458@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Sudarmono, S.STP, M.Si, Ph.D
Email: sudarmono@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *This study examines the public's perception on the activities of armed criminal groups (KKB) in local economic development in Papua Pegunungan Province. It focuses on the roles of local communities, economic actors, and local government in interpreting how KKB-related insecurity affects economic mobility, business continuity, and development implementation.* ***Purpose:*** *This study examines the public's perception on the activities of armed criminal groups (KKB) in local economic development in Papua Pegunungan Province.* ***Method:*** *A qualitative descriptive approach was used, with data collected through in-depth interviews, documentation, and secondary sources such as official reports from BPS, the Papua Regional Police, the National Commission on Human Rights, and regional policy documents. The data were analyzed interactively through data reduction, data display, and conclusion drawing and verification.* ***Result:*** *The findings indicate that KKB activity is perceived as a concrete disruption that limits community access to gardens, markets, distribution routes, schools, airports, and construction sites. These disruptions increase logistics costs, halt infrastructure projects, weaken trade activities, reduce productivity, and constrain participation in productive economic activities. At the same time, communities and local government demonstrate adaptive capacity through changes in daily activity patterns, stronger social solidarity, and efforts to sustain livelihoods under unsafe conditions.* ***Conclusion:*** *The study concludes that security stability is a crucial prerequisite for inclusive and sustainable local economic development in Papua Pegunungan.*
Keywords: *KKB Activities, Local Economic Development, Papua Mountains, Security Stability, Adaptation Strategy*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penelitian ini menganalisis persepsi masyarakat terhadap aktivitas kelompok kriminal bersenjata (KKB) dalam pembangunan ekonomi lokal di Provinsi Papua Pegunungan. Fokus kajian diarahkan pada peran masyarakat lokal, pelaku ekonomi, dan pemerintah daerah dalam memaknai dampak KKB terhadap mobilitas ekonomi, keberlanjutan usaha, dan pelaksanaan pembangunan. **Tujuan:** Penelitian ini menganalisis persepsi masyarakat terhadap aktivitas kelompok kriminal bersenjata (KKB) dalam pembangunan ekonomi lokal di Provinsi Papua Pegunungan. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan data sekunder dari laporan resmi BPS, Polda Papua, Komnas HAM, serta dokumen kebijakan daerah. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil/Temuan: Hasil kajian menunjukkan bahwa aktivitas KKB dipahami sebagai gangguan nyata yang menekan akses masyarakat ke kebun, pasar, jalur distribusi, sekolah, bandara, dan lokasi proyek pembangunan. Gangguan ini berdampak pada peningkatan biaya logistik, terhentinya proyek infrastruktur, melemahnya aktivitas perdagangan, menurunnya produktivitas, serta terbatasnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif. Di sisi lain, masyarakat dan pemerintah daerah menunjukkan kapasitas adaptif melalui perubahan pola aktivitas, penguatan solidaritas sosial, dan upaya menjaga keberlanjutan penghidupan di tengah situasi tidak aman. **Kesimpulan:** Temuan ini menegaskan bahwa stabilitas keamanan merupakan prasyarat penting bagi pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan di Papua Pegunungan.
Kata kunci: Aktivitas KKB, Pembangunan Ekonomi Lokal, Papua Pegunungan, Stabilitas Keamanan, Strategi Adaptasi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Papua Pegunungan merupakan daerah otonomi baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 dengan tujuan mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat pelayanan publik di wilayah pegunungan tengah Papua. Namun, pembangunan di provinsi ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang kerap melakukan tindakan kekerasan dan teror terhadap masyarakat maupun aparatur negara (Az., 2016). Aktivitas KKB, seperti penembakan, penyanderaan, perusakan fasilitas umum, dan gangguan terhadap proyek strategis nasional, berdampak langsung terhadap pembangunan ekonomi lokal. Ketidakstabilan keamanan menyebabkan terganggunya mobilitas barang dan jasa, terhambatnya investasi, serta menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, pelaku usaha dan pekerja proyek infrastruktur sering menghentikan aktivitasnya karena ancaman keamanan sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah (Boediono, 2002).

Menurut Suaib (2017), pembangunan pada hakikatnya merupakan proses perubahan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal dan partisipatif. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Senada dengan itu, Raharjo (2021) menegaskan bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat memerlukan lingkungan yang aman agar masyarakat mampu berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi produktif. Data kasus kekerasan tahun 2021–2025 menunjukkan bahwa Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Nduga merupakan wilayah yang paling sering mengalami gangguan keamanan. Tingginya frekuensi insiden tersebut memperlihatkan bahwa faktor keamanan masih menjadi hambatan utama bagi percepatan pembangunan di Papua Pegunungan.

Sebagai provinsi yang baru terbentuk, Papua Pegunungan memiliki potensi ekonomi pada sektor pertanian, kehutanan, dan jasa publik. Namun, wilayah ini masih menghadapi kendala struktural berupa keterisolasian wilayah, minimnya infrastruktur dasar, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta gangguan keamanan akibat aktivitas KKB. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya produktivitas masyarakat dan melambatnya pembangunan sosial ekonomi di berbagai kabupaten. Berdasarkan data BPS (2025), perekonomian Papua Pegunungan pada triwulan I tahun 2025 mengalami kontraksi sebesar 2,17 persen dibandingkan triwulan IV tahun 2024. Sektor konstruksi menjadi sektor yang paling tertekan dengan kontraksi sebesar 11,47 persen. Meskipun nilai PDRB kabupaten-kabupaten di Papua Pegunungan terus meningkat selama periode 2019–2023, pertumbuhan tersebut masih berlangsung

dalam kondisi kerentanan struktural yang tinggi akibat gangguan keamanan yang memengaruhi mobilitas, distribusi, dan investasi.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Ahmad, Ali, dan Ahmad (2014) yang menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang karena meningkatkan ketidakpastian usaha, mengurangi investasi, dan menurunkan produktivitas ekonomi. Selain itu, Osawe (2015) menyatakan bahwa meningkatnya kekerasan dan ketidakamanan menjadi ancaman serius bagi pembangunan sosial ekonomi karena menghambat aktivitas perdagangan, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Polda Papua mencatat 101 insiden yang melibatkan KKB selama Januari–Juni 2025 dengan 43 korban meninggal dunia dan 47 korban luka-luka, sedangkan Komnas HAM Papua melaporkan 40 kasus kekerasan pada periode yang sama. Kabupaten Yahukimo menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa eskalasi kekerasan masih tinggi dan berdampak signifikan terhadap stabilitas sosial maupun ekonomi lokal (Robertus, 2025).

Fenomena serupa juga ditemukan oleh Adamu dan Abdullahi (2021) yang meneliti aktivitas kelompok bersenjata di Zamfara State, Nigeria. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa konflik bersenjata menyebabkan menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat, meningkatnya kemiskinan, terganggunya kegiatan pertanian, serta menurunnya pendapatan masyarakat akibat ketidakstabilan keamanan. Kondisi ini memiliki kemiripan dengan situasi yang terjadi di beberapa wilayah Papua Pegunungan yang bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan lokal. Stabilitas keamanan merupakan prasyarat utama bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Gangguan keamanan akibat aktivitas KKB tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghambat pemerataan pembangunan, stabilitas sosial-ekonomi, pemberdayaan masyarakat, serta konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur (Hasibuan, 2019; Arifuddin M. Arif, 2024). Temuan Freedman dan Owens (2016) menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas di suatu wilayah berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi lokal karena kejahatan meningkatkan biaya ekonomi, mengurangi daya tarik investasi, dan memperlambat proses pembangunan daerah.

Penelitian terdahulu mengenai Papua umumnya masih menempatkan konflik sebagai isu pada level makro yang berfokus pada aspek politik, hak asasi manusia, dan kebijakan otonomi khusus. Chandra et al. (2024) misalnya, mengkaji akar konflik Papua melalui pendekatan structural, accelerator, and trigger, sementara Zahidi dan Othman (2024) menyoroti isu HAM Papua melalui systematic literature review. Di sisi lain, Sarjito (2024) memfokuskan kajiannya pada pelanggaran HAM sebagai bagian dari perdebatan intervensi internasional. Berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami konflik Papua secara umum, namun belum banyak menjelaskan bagaimana konflik dan gangguan keamanan memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat pada tingkat lokal, khususnya di wilayah Papua Pegunungan yang memiliki karakteristik geografis terpencil, biaya logistik tinggi, dan ketergantungan masyarakat terhadap stabilitas keamanan dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.

Selain itu, penelitian yang membahas KKB lebih banyak diarahkan pada aspek resolusi konflik, kebijakan keamanan, maupun implementasi otonomi khusus. Lamere (2024) menelaah pengaruh otonomi khusus terhadap pembangunan ekonomi Papua, sedangkan Pasaribu et al. (2023) dan Amanda dan Pramono (2023) lebih menekankan konflik KKB dalam perspektif hukum dan penyelesaian konflik. Sementara itu, Sofyan dan Pramesti (2024) mengkaji peran pemerintah dalam penanganan isu HAM di Papua Pegunungan, tetapi belum secara spesifik menguraikan dampak ekonomi yang dirasakan

masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada hubungan antara aktivitas KKB dan pembangunan ekonomi lokal melalui pendekatan kualitatif yang menggali pengalaman masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah secara langsung. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjelaskan mekanisme bagaimana gangguan keamanan memengaruhi mobilitas ekonomi, distribusi barang dan jasa, keberlanjutan usaha, serta pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian pembangunan daerah, tetapi juga mempertegas bahwa stabilitas keamanan merupakan salah satu prasyarat penting bagi keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Suaib (2017) dan Raharjo (2021).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan idealnya mensyaratkan adanya stabilitas keamanan guna menjamin kelancaran mobilitas barang, kepastian investasi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam aktivitas produksi dan perdagangan. Pemerintah Indonesia melalui UU No. 16 Tahun 2022 telah membentuk Provinsi Papua Pegunungan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan harapan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan lokal. Namun, realitas (*das sein*) menunjukkan pertentangan yang tajam. Aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang terus bereskalasi secara konkret telah memicu kontraksi ekonomi wilayah sebesar 2,17% pada triwulan I tahun 2025, di mana sektor konstruksi terpukul paling dalam hingga minus 11,47% akibat terhentinya proyek-proyek strategis. Terjadi kesenjangan operasional di mana anggaran pembangunan terus dikucurkan, tetapi tidak dapat dieksekusi secara optimal karena faktor ketakutan pekerja dan sabotase jalur logistik.

Sebagian besar literatur mengenai konflik Papua selama ini terjebak pada analisis level makro yang berpusat pada dinamika politik separatisme, isu pelanggaran HAM internasional, dan evaluasi kebijakan fiskal Otonomi Khusus (Otsus). Terdapat kekosongan kajian (*gap*) yang secara spesifik memotret bagaimana gangguan keamanan tersebut merembes ke bawah dan memengaruhi keputusan ekonomi mikro masyarakat sehari-hari—seperti keputusan petani mengurangi luas tanam atau pedagang yang memperpendek jam operasional pasar. Belum ada penelitian terdahulu di wilayah DOB Papua Pegunungan yang mengintegrasikan secara simultan persepsi dari tiga aktor utama: masyarakat subsisten (petani/buruh), pelaku usaha ekonomi (pedagang), dan pemerintah daerah selaku eksekutor kebijakan dalam menerjemahkan ketahanan ekonomi (*resilience development*) di tengah situasi konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut.

1.3. Urgensi Penelitian

Berdasarkan kondisi keamanan yang masih berfluktuasi dan tingginya intensitas aktivitas Kelompok Kriminal Bersenenjata (KKB) di Provinsi Papua Pegunungan, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana masyarakat memandang dampak aktivitas KKB terhadap pembangunan ekonomi lokal, khususnya terhadap mobilitas ekonomi, keberlanjutan usaha, distribusi barang, akses layanan dasar, serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Pemahaman mengenai persepsi masyarakat menjadi penting karena masyarakat merupakan pihak yang secara langsung merasakan konsekuensi dari situasi keamanan yang tidak stabil. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian keilmuan mengenai hubungan antara keamanan dan pembangunan ekonomi lokal di daerah konflik, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih adaptif, inklusif, dan sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka berbagai dampak sosial-ekonomi yang dialami masyarakat berpotensi tidak teridentifikasi secara komprehensif, sehingga kebijakan pembangunan yang diterapkan

dapat kurang tepat sasaran dan berisiko memperlambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Pegunungan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji konflik Papua dari berbagai perspektif. Chandra dkk. (2024) menelaah akar konflik Papua melalui model Structural, Accelerator, and Trigger (SAT) dan menemukan bahwa persoalan utama konflik berkaitan dengan rendahnya kepercayaan masyarakat, ketimpangan ekonomi, dan perbedaan kepentingan. Sementara itu, Zahidi dan Othman (2024) memetakan isu hak asasi manusia di Papua melalui systematic literature review yang menunjukkan dominasi tema kekerasan, masyarakat adat, geopolitik, dan komunitas lokal. Simamora dkk. (2025), Sarjito (2024), serta Sofyan dan Putri (2024) juga mengkaji konflik Papua dari perspektif hukum, HAM, dan peran pemerintah dalam perlindungan masyarakat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa konflik Papua tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga menyangkut aspek sosial, politik, dan hak-hak masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Jonathan dkk. (2021) yang menjelaskan bahwa tingkat kriminalitas dan konflik yang tinggi dapat menghambat pembangunan sosial-ekonomi melalui penurunan investasi, terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat, serta meningkatnya biaya sosial yang harus ditanggung pemerintah dan masyarakat.

Sejumlah penelitian lainnya menyoroti upaya penyelesaian konflik melalui kebijakan otonomi khusus. Firman dan Sofian (2025) menjelaskan bahwa Otonomi Khusus Papua merupakan bentuk desentralisasi asimetris yang memberikan ruang afirmasi politik bagi Orang Asli Papua. Sufajar dkk. (2025), Sinen (2025), Kossay (2022), dan Sa'diyah (2022) menilai bahwa otonomi khusus telah menjadi instrumen penting dalam membangun rekonsiliasi dan kesejahteraan masyarakat, namun belum sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan keamanan, ketimpangan pembangunan, dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan dan tata kelola pemerintahan memiliki hubungan erat dengan dinamika konflik yang masih berlangsung di Papua. Dalam konteks penanganan konflik, Subagyo (2018) menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam menciptakan stabilitas keamanan sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Penelitian yang berfokus pada aspek ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di Papua masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Widiprana (2022) menemukan bahwa Dana Otonomi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sedangkan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Lani, Batiar, dan Rante (2024) menegaskan pentingnya keberadaan Jalan Trans Papua dalam meningkatkan konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, Lamere (2024) menyimpulkan bahwa otonomi khusus telah membantu pembangunan infrastruktur dan dukungan fiskal, tetapi masih dihadapkan pada persoalan ketimpangan, kualitas sumber daya manusia, dan tata kelola. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi Papua tidak hanya ditentukan oleh kebijakan fiskal dan infrastruktur, tetapi juga oleh kondisi sosial dan keamanan wilayah. Sejalan dengan hal tersebut, Ndraha dan Uang (2018) menjelaskan bahwa pengembangan ekonomi lokal yang berbasis pemberdayaan masyarakat menjadi strategi penting untuk meningkatkan kemandirian ekonomi daerah, terutama pada wilayah yang memiliki keterbatasan akses dan tantangan pembangunan yang kompleks.

Selanjutnya, beberapa penelitian secara khusus membahas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Putri dkk. (2022), Zam dan Himmawan (2023), Pasaribu, Ismail, dan Towadi (2023),

Amanda dan Pramono (2023), Ediyono dan Syahputra (2024), Irfan dkk. (2024), serta Wahidah, Pamungkas, dan Amanusa (2025) menjelaskan bahwa aktivitas KKB berdampak pada gangguan keamanan, pelanggaran HAM, ketidakstabilan politik, serta hambatan terhadap pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, Azzaki (2025) menunjukkan bahwa konflik yang bersumber dari perbedaan kepentingan dan klaim atas sumber daya dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan serta menimbulkan resistensi sosial yang berkepanjangan apabila tidak dikelola secara partisipatif. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek hukum, HAM, manajemen konflik, resolusi konflik, dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, masih terdapat ruang penelitian yang menelaah secara lebih spesifik bagaimana masyarakat memersepsikan aktivitas KKB serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi lokal di Provinsi Papua Pegunungan. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menitikberatkan pada pengalaman masyarakat, pelaku ekonomi, dan pemerintah daerah dalam menghadapi hambatan pembangunan ekonomi akibat aktivitas KKB.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pergeseran fokus analisis dari manajemen konflik politik-keamanan makro menuju pada ketahanan ekonomi lokal berbasis persepsi komunitas terdampak langsung di wilayah DOB baru. Perbedaan dengan Penelitian A (Chandra et al., 2024; Sarjito, 2024): Penelitian mereka menggunakan Teori Konflik Makro dengan model *Structural, Accelerator, and Trigger (SAT)* untuk memetakan akar konflik Papua dari aspek pelanggaran HAM dan intervensi internasional. Sementara penelitian Praja menggunakan Teori Pembangunan Ekonomi Lokal dan Strategi Adaptasi, yang berfokus pada pengalaman mikro masyarakat dalam mempertahankan rantai pasok penghidupan mereka. Perbedaan dengan Penelitian B (Zahidi & Othman, 2024): Secara Metode, penelitian B menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)* untuk memetakan isu geopolitik global Papua. Sebaliknya, penelitian Praja menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif Lapangan dengan teknik wawancara mendalam langsung kepada petani, pedagang pasar, dan buruh proyek di Kabupaten Yahukimo dan Pegunungan Bintang. Perbedaan dengan Penelitian C (Lamere, 2024; Widiprana, 2022): Penelitian C berfokus pada Kebijakan Fiskal yaitu dampak Dana Otonomi Khusus terhadap PDRB menggunakan analisis kuantitatif. Sedangkan penelitian Praja berfokus pada Kebijakan Stabilitas Keamanan sebagai prasyarat utama pembangunan, yang diukur lewat kapasitas adaptif non-fiskal masyarakat lokal. Perbedaan dengan Penelitian D (Pasaribu et al., 2023; Amanda & Pramono, 2023): Penelitian D menitikberatkan pada aspek Resolusi Konflik dan Perspektif Hukum dalam penanganan KKB. Sementara penelitian Praja menggeser sudut pandang hukum tersebut ke arah Lanskap Target Ekonomi, yaitu mengidentifikasi dampak KKB terhadap ruang subsisten, ruang mobilitas, dan ruang ekstraktif. Perbedaan dengan Penelitian E (Karakteristik Objek Spesifik): Penelitian terdahulu umumnya mengambil lokus di wilayah induk Papua yang aksesnya mapan (seperti Jayapura atau Mimika). Kebaruan objek penelitian ini terletak pada karakteristik geografis ekstrem Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Pegunungan (khususnya Yahukimo dan Pegunungan Bintang) yang terisolasi secara struktural, memiliki biaya logistik sangat tinggi (ketergantungan angkutan udara), dan berada dalam tingkat kerentanan konflik harian tertinggi.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam pembangunan ekonomi lokal di Provinsi Papua

Pegunungan, khususnya terkait dampaknya terhadap mobilitas ekonomi, keberlanjutan usaha masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif karena bertujuan memahami secara mendalam persepsi masyarakat terhadap aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam pembangunan ekonomi lokal di Provinsi Papua Pegunungan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali realitas sosial yang kompleks dan kontekstual berdasarkan pengalaman, pandangan, serta makna yang diberikan oleh masyarakat dan pemerintah daerah terhadap fenomena yang diteliti (Creswell, 2018; Sugiyono, 2018). Penelitian dilaksanakan di Provinsi Papua Pegunungan dengan fokus pada Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang yang dipilih karena memiliki frekuensi aktivitas KKB yang relatif tinggi serta ketergantungan masyarakat yang besar terhadap sektor pertanian, perdagangan, dan jasa lokal. Penelitian berlangsung selama enam bulan, yaitu Oktober 2025 sampai Maret 2026. Informan ditentukan secara purposive dengan mempertimbangkan penguasaan informasi dan keterlibatan langsung terhadap dampak aktivitas KKB. Informan kunci dalam penelitian ini adalah masyarakat lokal, pelaku ekonomi (petani, pedagang, dan buruh), serta pemerintah daerah yang dinilai memiliki pengalaman dan pengetahuan mendalam mengenai kondisi keamanan dan pembangunan ekonomi di wilayah penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), dokumentasi, serta penelaahan data sekunder yang berasal dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Polda Papua, Komnas HAM, dan dokumen kebijakan daerah. Teknik wawancara dipilih untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai dampak aktivitas KKB terhadap mobilitas ekonomi, keberlangsungan usaha, dan pelaksanaan pembangunan dari perspektif para informan. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman (2014), yang meliputi reduksi data, penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan triangulasi sumber dan metode serta member checking kepada informan sehingga hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi (Miles & Huberman, 2014).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Persepsi Masyarakat Terhadap Aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Dalam Pembangunan Ekonomi Lokal Di Provinsi Papua Pegunungan

3.1.1 Latar Kerentanan Wilayah dan Struktur Ekonomi

Kondisi geografis ekstrem di Papua Pegunungan menimbulkan ketergantungan tinggi pada akses fisik ke luar daerah. Jarak antarkota yang hanya puluhan kilometer dapat memerlukan perjalanan puluhan jam hingga berhari-hari karena kontur medan yang berat (Agustus et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi lokal sangat bergantung pada jaringan transportasi dan logistik. Infrastruktur jalan yang terbatas serta mahalnya angkutan udara menjadi faktor utama akses pasar dan suplai bahan pokok. Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, menegaskan bahwa optimalisasi jalan Trans Papua penting untuk menurunkan biaya logistik yang selama ini membebani daerah (KPU Pegunungan Bintang, 2025). Temuan Agustus et al. (2025) juga mengidentifikasi kendala logistik akibat medan terjal Papua sebagai hambatan utama pembangunan. Oleh karena itu, keamanan jalur

logistik, jembatan penghubung, dan pasar tradisional menjadi sangat penting karena gangguan keamanan pada titik-titik tersebut langsung mengacaukan sirkulasi barang, uang, dan peran negara.

Struktur ekonomi Papua Pegunungan masih didominasi sektor primer. BPS Provinsi Papua (2025) mencatat sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Data Podes menunjukkan 2.623 dari 2.634 desa/kelurahan memiliki penduduk yang bekerja di sektor pertanian, sedangkan hanya delapan desa di sektor perdagangan dan tiga desa di sektor pemerintahan serta pertahanan (BPS, 2025). Ketergantungan yang tinggi pada sektor primer menunjukkan rendahnya diversifikasi ekonomi lokal. Sebagian besar usaha pertanian masih bersifat subsisten dan sangat rentan terhadap hambatan distribusi. KPU Kabupaten Pegunungan Bintang (2025) melaporkan bahwa sebagian besar wilayah belum tersambung jalan darat sehingga logistik harus diangkut melalui udara atau laut kecil dengan biaya tinggi dan waktu pengiriman yang lambat. Akibatnya, pelaku usaha rumah tangga dan pedagang kecil menghadapi biaya distribusi yang besar. Tingginya harga barang pokok, seperti semen yang mencapai puluhan kali lipat harga di Jayapura, mencerminkan kondisi tersebut.

Kerentanan ini diperparah oleh rendahnya cadangan ekonomi rumah tangga. BPS (2025) mencatat Papua Pegunungan memiliki persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia, sekitar 30,0% pada Maret 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan bertahan yang rendah ketika terjadi gangguan keamanan. Pemalangan jalan atau penutupan pasar segera menyebabkan hasil produksi tidak terserap dan harga menjadi tidak stabil. Dalam situasi ini, proyek pembangunan menjadi penyangga sementara ekonomi lokal melalui aliran anggaran negara, tetapi proyek tersebut juga rentan terhadap tekanan konflik karena terganggunya pengadaan bahan dan tenaga kerja.

Berdasarkan wawancara dengan petani sayur di Wamena, kerentanan wilayah tidak hanya terkait keterisolasian geografis, tetapi juga memengaruhi pola produksi dan distribusi rumah tangga tani. Sebelum eskalasi konflik tahun 2023, aktivitas bertani berjalan relatif normal. Namun setelah muncul kabar penembakan, pembakaran, sweeping, dan suara tembakan di berbagai titik, keputusan ekonomi menjadi lebih berhati-hati. Rasa takut membuat warga membatalkan keberangkatan ke kebun meskipun tidak terjadi insiden langsung. Gangguan KKB akhirnya memengaruhi ukuran produksi, luas tanam, dan orientasi kerja keluarga tani. Karena panen sayur tidak dapat ditunda terlalu lama dan akses pasar semakin tidak pasti, banyak petani memilih mengurangi luas tanam untuk menghindari risiko kerugian. Konflik mendorong rumah tangga tani bergeser dari logika produksi menuju logika pengamanan minimum, dengan prioritas pada kepastian hasil panen dapat sampai ke pasar. Pendapatan yang sebelumnya sekitar tiga hingga empat juta rupiah per musim turun sekitar 40–60%, menunjukkan bahwa gangguan keamanan tidak hanya menurunkan omzet tetapi juga memutus ritme ekonomi keluarga.

Pada kelompok pedagang pasar di Wamena, kerentanan terlihat pada menurunnya sirkulasi uang harian dan aktivitas pasar. Sebelum konflik meningkat pada 2023, pasar ramai dari pagi hingga sore dan banyak kios buka hingga malam. Setelah gangguan keamanan semakin sering terjadi, pembeli datang seperlunya dan segera pulang, sementara pedagang menyesuaikan jam operasional karena tidak lagi merasa aman. Informan menyebut omset turun sekitar 35%, stok barang lebih lambat terjual, dan aktivitas belanja malam hari menurun. Hal ini menunjukkan bahwa gangguan KKB tidak hanya memengaruhi sisi pasokan, tetapi juga permintaan. Pedagang merespons dengan menutup kios lebih awal, mengurangi stok, dan menghindari pembelian dalam jumlah besar. Pasar tidak lagi menjadi ruang transaksi yang netral, melainkan ruang yang dipenuhi perhitungan risiko. Perubahan perilaku kolektif masyarakat juga terlihat dari berkurangnya aktivitas malam hari dan semakin jarangnya penggunaan jalur ekonomi yang dianggap rawan. Dengan demikian, konflik mengubah volume perdagangan, pola waktu, keberanian, dan strategi bertahan pelaku ekonomi kecil.

Sementara itu, pengalaman buruh proyek di Nduga dan guru atau PNS di Jayawijaya menunjukkan bahwa dampak KKB juga menjalar ke sektor pembangunan fisik dan pelayanan publik. Buruh proyek menjelaskan bahwa sebelum konflik memburuk, distribusi material dan aktivitas kerja berjalan relatif lancar. Setelah eskalasi konflik tahun 2023, hambatan utama muncul dari rasa takut yang dialami pekerja, mandor, dan pengangkut material. Proyek sering tertunda selama beberapa minggu hingga beberapa bulan karena truk material enggan masuk dan pekerja tidak berani berangkat. Akibatnya, pendapatan mereka turun hingga setengah karena berkurangnya hari kerja. Di sisi lain, guru dan PNS tetap menerima pendapatan, tetapi mengalami peningkatan absensi dan keterbatasan mobilitas. Keputusan berangkat ke sekolah atau kantor selalu mempertimbangkan keamanan jalur yang dilalui. Kondisi ini menunjukkan bahwa bahkan kelompok yang relatif stabil secara ekonomi tetap mengalami gangguan pada ritme kerja dan kapasitas hadir di ruang publik. Dengan demikian, KKB tidak hanya menekan sektor ekonomi harian, tetapi juga melemahkan fungsi negara dalam pendidikan dan pelayanan administrasi. Kerentanan wilayah Papua Pegunungan akhirnya menjadi kondisi yang secara langsung membentuk keputusan ekonomi, keberlangsungan proyek pembangunan, dan kualitas layanan publik dalam kehidupan sehari-hari.

3.1.2 Bentuk Gangguan KKB, Pola Insiden, dan Target Ekonomi

Berdasarkan rekap insiden dari berbagai sumber berita resmi, gangguan KKB di Papua Pegunungan menunjukkan pola yang semakin berlapis dari sisi target, lokasi, dan fungsi ruang yang diserang. Sasaran tidak lagi bersifat individual, tetapi meluas ke ruang strategis bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat seperti jalur transportasi, fasilitas pendidikan, bandara, rumah warga, kantor kepolisian, dan lokasi kegiatan ekonomi berbasis sumber daya. Pola ini menunjukkan bahwa konflik berlangsung mengikuti logika penguasaan ruang yang berhubungan dengan mobilitas warga, distribusi barang, dan kehadiran institusi negara. Sasaran awal berupa pekerja transportasi lokal kemudian berkembang ke sekolah dan pesawat kargo, lalu bergeser ke bandara, rumah anggota TNI, ruang permukiman sipil, pendulang emas, hingga aparat keamanan. Pergeseran tersebut menunjukkan perluasan medan konflik menuju simpul-simpul ekonomi dan pelayanan publik yang lebih sentral.

Rekap insiden KKB tahun 2022–2025 memperlihatkan bahwa target utama meliputi pekerja jasa transportasi lokal, fasilitas pendidikan, transportasi udara, aparat keamanan, warga sipil, kantor kepolisian, serta pekerja pendulangan emas. Serangan terhadap tukang ojek di Pegunungan Bintang, pembakaran sekolah di Yahukimo, penembakan pesawat di Bandara Nop Goliat Dekai, penembakan aparat keamanan di Jayawijaya, hingga pembunuhan pendulang emas di Yahukimo menunjukkan bahwa sasaran konflik tidak hanya berfokus pada aparat negara, tetapi juga ruang ekonomi dan pelayanan publik yang menopang kehidupan masyarakat. Dengan demikian, gangguan KKB menyasar simpul-simpul mobilitas, distribusi, dan aktivitas ekonomi yang vital bagi Papua Pegunungan.

Wawancara lapangan dan dokumentasi keamanan menunjukkan bahwa KKB melakukan berbagai bentuk gangguan eksplisit, mulai dari penembakan, intimidasi bersenjata, pemalangan jalan, ancaman terhadap pedagang, hingga perusakan fasilitas publik. Maulida dan Angela (2024) menyebut aksi KKB sebagai tindakan teror yang mengganggu keamanan, mobilitas, dan pelayanan publik. Bagi masyarakat lokal, penembakan di jalan, pemblokiran truk pengangkut barang, serta perusakan fasilitas publik dipandang sebagai bagian dari aktivitas rutin KKB. Gangguan juga terjadi terhadap pedagang pasar, pedagang keliling, petani, dan proyek pembangunan jalan maupun jembatan. Bentuk gangguan yang paling umum meliputi: (1) gangguan bersenjata langsung, (2) gangguan fisik struktural seperti pemalangan jalan dan sabotase fasilitas, (3) gangguan kewilayahan ekonomi berupa ancaman terhadap pedagang dan pembatasan aktivitas pasar, serta (4) gangguan proyek berupa penyerangan pekerja dan pembakaran peralatan konstruksi. Seluruh bentuk gangguan ini dipersepsikan masyarakat sebagai

instrumen teror yang bertujuan menimbulkan ketakutan kolektif dan mengganggu akses ekonomi komunitas.

Distribusi temporal dan spasial gangguan KKB memperlihatkan konsentrasi pada koridor logistik utama dan wilayah dengan mobilitas tinggi. Data Satgas Damai Cartenz mencatat 204 insiden KKB sepanjang 2023 di Papua, dengan jumlah tertinggi berada di Kabupaten Yahukimo sebanyak 38 peristiwa. Secara temporal, Agustus 2023 menjadi periode dengan insiden terbanyak, sedangkan secara spasial jalur Trans Papua dan jalan penghubung antar kabupaten pedalaman menjadi titik rawan konflik karena merupakan jalur utama logistik dan simbol kehadiran negara. Sejumlah peristiwa besar seperti penyanderaan pilot Susi Air pada Februari 2023 serta pembunuhan aktivis HAM Michelle K. pada Agustus 2023 memperkuat persepsi bahwa KKB mampu mengganggu transportasi udara dan menarget tokoh sipil, sehingga memperluas dampak ketakutan di masyarakat.

Lanskap target ekonomi KKB terlihat dari cara gangguan menempel pada simpul-simpul subsisten dan distribusi. Struktur ekonomi Papua Pegunungan yang bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadikan jalan, pasar, sekolah, ojek, dan transportasi udara sebagai penghubung utama aktivitas ekonomi rumah tangga. Karena itu, penyerangan terhadap tukang ojek di Pegunungan Bintang, pembakaran sekolah, dan penembakan pesawat kargo di Oksibil dapat dipahami sebagai serangan terhadap simpul peredaran ekonomi harian. Ketergantungan banyak wilayah pada transportasi udara membuat gangguan terhadap bandara dan pesawat segera meningkatkan biaya logistik, menunda pasokan barang, dan memengaruhi keputusan produksi masyarakat. Penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nop Goliat Dekai pada 2024 menunjukkan bahwa transportasi udara merupakan nadi distribusi barang kebutuhan pokok dan mobilitas ekonomi lokal. Dengan demikian, target ekonomi di Papua Pegunungan lebih berupa jaringan kehidupan sehari-hari dibanding pusat modal besar.

Pada lapisan berikutnya, target ekonomi bergerak ke ruang yang memadukan uang tunai, tenaga kerja, dan kehadiran negara. Pembunuhan 11 pendulang emas di Kali Silet, Yahukimo, menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi ekstraktif di pedalaman menjadi sasaran karena berkaitan dengan perputaran uang, mobilitas, dan kontrol wilayah. Serangan terhadap pendulang emas memperlihatkan bahwa lokasi ekonomi dipandang sebagai ruang yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan penguasaan teritorial. Pola serupa terlihat pada proyek pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Gangguan terhadap proyek pembangunan tidak hanya menghambat pekerjaan fisik, tetapi juga memutus hubungan antara kebijakan pembangunan dan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Karena proyek infrastruktur bergantung pada distribusi material dan kondisi keamanan, gangguan pada satu titik dapat menyebabkan keterlambatan pekerjaan, tertundanya pembayaran upah, dan meningkatnya biaya proyek.

Secara keseluruhan, target ekonomi KKB di Papua Pegunungan dapat dipetakan ke dalam tiga lapisan utama, yaitu ruang subsisten yang bergantung pada kebun dan pasar, ruang mobilitas yang bergantung pada jalan dan bandara, serta ruang ekstraktif dan proyek yang bergantung pada tenaga kerja, alat produksi, dan jaminan keamanan. Ketiga ruang tersebut saling terhubung, sehingga ketika satu simpul terganggu, simpul lainnya ikut melemah dan aktivitas ekonomi masyarakat bergeser dari orientasi produktif menuju strategi bertahan hidup yang lebih hati-hati.

3.1.3 Efek Langsung Konflik Terhadap Siklus Produksi, Distribusi, dan Keamanan Sosial Ekonomi

Gangguan keamanan menimbulkan efek psikologis dan perubahan perilaku sosial ekonomi masyarakat. Warga yang hidup dalam ketidakpastian cenderung mengambil langkah defensif, seperti pedagang yang mengurangi jam buka atau menutup toko lebih awal karena takut menjadi sasaran kekerasan (Media Jayawijaya, 2026). Petani sering menunda perjalanan ke kebun ketika muncul rumor

serangan, sedangkan pekerja harian menolak memasuki wilayah pedalaman setelah terjadi insiden bersenjata. Akibatnya, proyek pembangunan seperti pelebaran jalan dan perbaikan jembatan sering tertunda. Secara kolektif, perilaku defensif ini memperlambat peredaran barang, perputaran modal, dan pelaksanaan proyek ekonomi. Trauma masyarakat terhadap konflik juga menyebabkan penimbunan sembako dan meningkatnya kewaspadaan, sehingga pemulihan ekonomi pasca-insiden menjadi lebih lambat. Dengan demikian, ketidakamanan tidak hanya menimbulkan korban langsung, tetapi juga menciptakan kecemasan kolektif yang menghambat aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.

Konflik bersenjata di Papua Pegunungan perlu dipahami sebagai fenomena struktural, bukan sekadar persoalan keamanan. Ariffin dan Naghmah (2026) menegaskan bahwa kekerasan di Papua berakar pada ketimpangan pembangunan, marginalisasi masyarakat adat, ketimpangan distribusi sumber daya, dan minimnya partisipasi politik. Dalam konteks ini, aktivitas KKB dapat dipahami sebagai respon terhadap konflik struktural yang telah berlangsung lama. Oleh karena itu, tindakan KKB tidak hanya dipandang sebagai penyebab konflik, tetapi juga sebagai gejala dari kegagalan sistemik dalam pembagian kekuasaan dan sumber daya. Secara historis, konflik Papua berkembang sejak fase integrasi tahun 1969. Pamungkas (2015), Amatullah (2025), dan Silitonga (2025) menjelaskan bahwa proses integrasi, pola militarisasi, sekuritisasi, represi politik, serta ketimpangan sosial ekonomi telah membentuk krisis kepercayaan yang berkepanjangan antara masyarakat dan negara. Kerentanan awal tersebut diperkuat oleh akses layanan publik yang tidak merata, hambatan birokrasi, dan rendahnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan (Chasib, 2024). Dengan demikian, konflik yang terjadi saat ini merupakan hasil akumulasi persoalan historis, politik, dan sosial yang berlangsung dalam jangka panjang.

Pada tahap berikutnya, kerentanan historis bertemu dengan kondisi sosial ekonomi yang masih lemah. Komnas HAM (2024) mencatat 113 peristiwa HAM di Papua sepanjang tahun 2024, dengan 85 kasus terkait konflik bersenjata dan kekerasan. Sementara itu, BPS menunjukkan bahwa Papua Pegunungan memiliki tingkat kemiskinan sebesar 30,03 persen dan IPM 54,91 pada tahun 2025. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masyarakat menghadapi keterbatasan kesejahteraan di tengah situasi konflik. Akibatnya, rasa tidak adil semakin menguat karena warga merasakan langsung ketimpangan akses, perlindungan, dan kualitas hidup. Dalam kondisi tersebut, resistensi sosial bersenjata menjadi lebih mudah tumbuh sebagai respon terhadap pengalaman ketidakadilan yang terus berulang.

Setelah krisis kepercayaan terbentuk, gangguan keamanan menjalar ke ruang ekonomi yang sangat bergantung pada mobilitas. Struktur ekonomi Papua Pegunungan yang masih bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadikan jalan, bandara, jembatan, pasar, dan lokasi proyek sebagai simpul utama aktivitas ekonomi. Ketika simpul tersebut terganggu, produksi, distribusi, dan layanan publik ikut terganggu. Petani kesulitan menjual hasil panen, pedagang mengalami keterlambatan pasokan, dan pekerja proyek kehilangan akses kerja. Oleh karena itu, setiap gangguan keamanan segera berubah menjadi gangguan ekonomi yang memaksa masyarakat mengurangi aktivitas produksi dan mobilitas.

Ketika sirkulasi ekonomi menyempit, tekanan tidak hanya berupa penurunan pendapatan tetapi juga reproduksi kerentanan yang lebih luas. Masyarakat merespons dengan mengurangi luas tanam, mengurangi stok dagangan, menunda proyek, membatasi perjalanan, dan memusatkan sumber daya pada kebutuhan dasar. Strategi ini membantu bertahan dalam jangka pendek, tetapi sekaligus memperdalam rasa tidak aman dan mempersempit ruang ekonomi masyarakat. Komnas HAM (2024) menegaskan bahwa pemulihan konflik harus mencakup pemulihan fasilitas publik, pemenuhan kebutuhan pengungsi, dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan. Dengan demikian, kerentanan lama yang berasal dari sejarah integrasi dan ketimpangan pembangunan bertemu dengan kerentanan

baru akibat gangguan keamanan dan melemahnya aktivitas ekonomi, sehingga membentuk siklus kerentanan yang terus berulang.

Gambar 1.
Analisis Kausal Reproduksi Kerentanan

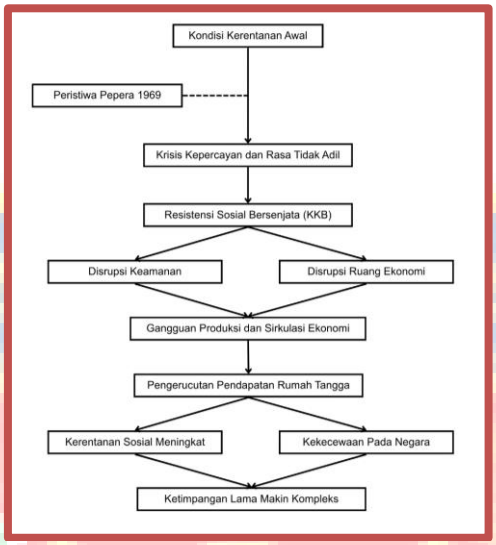

Berdasarkan Gambar 1. kondisi kerentanan awal menjadi fase paling hulu dalam reproduksi konflik di Papua Pegunungan. Kerentanan tersebut bersumber dari faktor historis, geografis, dan politik yang saling bertumpuk. Peristiwa Pepera 1969 menjadi bagian dari memori politik yang memengaruhi cara sebagian masyarakat memandang legitimasi negara dan penyelesaian masalah Papua (Pamungkas, 2015; Polri, 2020). Kerentanan ini diperkuat oleh keterisolasian wilayah, tingginya biaya logistik, rendahnya konektivitas, dan tingkat kesejahteraan yang masih tertinggal, sehingga ketegangan sosial mudah berkembang menjadi ketegangan politik.

Pada fase krisis kepercayaan dan rasa tidak adil, akumulasi kerentanan tersebut masuk ke dalam pengalaman sosial masyarakat sehari-hari. Konflik yang terus berlangsung, dominasi pendekatan keamanan, serta tingginya kasus pelanggaran HAM memperkuat persepsi bahwa akses terhadap layanan, perlindungan, dan kesejahteraan belum terpenuhi secara merata. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan IPM yang rendah semakin memperkuat kondisi tersebut. Akibatnya, krisis kepercayaan berkembang menjadi ketidakpuasan yang lebih mendalam terhadap negara.

Fase berikutnya adalah resistensi sosial bersenjata, yang kemudian menghasilkan dua jalur dampak utama, yaitu disrupsi keamanan dan disrupsi ruang ekonomi. Pada jalur keamanan, konflik membatasi mobilitas masyarakat, meningkatkan rasa takut, dan mengganggu aktivitas sosial. Pada jalur ekonomi, konflik menghambat produksi, distribusi, dan perdagangan karena sebagian besar masyarakat masih bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Gangguan terhadap jalan, pasar, dan jalur distribusi secara langsung menekan ritme ekonomi rumah tangga dan usaha kecil.

Pada bagian akhir bagan terlihat bahwa penurunan pendapatan rumah tangga, meningkatnya kerentanan sosial, dan menurunnya kepercayaan kepada negara saling memperkuat satu sama lain. Kondisi ini membuat ketimpangan lama semakin kompleks dan memperkuat kerentanan yang sudah ada sebelumnya. Dengan demikian, konflik tidak hanya menghasilkan kerugian ekonomi, tetapi juga mereproduksi siklus kerentanan sosial, ekonomi, dan politik yang terus berulang di Papua Pegunungan.

3.2 Strategi dan Upaya Adaptasi yang Dilakukan Oleh Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Hambatan Pembangunan Ekonomi Akibat Aktivitas KKB di Papua Pegunungan

3.2.1 Strategi Adaptasi Petani, Pedagang, Buruh dan PNS

Tabel 1.
Perubahan Pola Aktivitas Beberapa Kelompok Informan

Kelompok Informan	Pendapatan Sebelum Konflik	Perubahan Pola Aktivitas (Pasca Eskalasi Konflik 2023)
Petani Sayur (Wamena)	Rp3–4 juta/musim	Pendapatan anjlok 40–60%, fokus bertahan (mengurangi masa tanam)
Pedagang Pasar (Wamena)	Rp5–6 juta/bulan	Omset turun ~35%; sebagian tutup kios saat malam; keberanian belanja turun
Buruh Bangunan Proyek (Nduga)	Rp2–3 juta/bulan	Pendapatan dipotong setengah; proyek bisa tertunda 2–3 bulan
PNS/Guru (Jayawijaya)	Gaji tetap	Beberapa guru enggan meninggalkan rumah dinas, absensi meningkat 20%

Sumber: Data Primer (2026)

Berdasarkan Tabel 1. eskalasi konflik sejak 2023 tidak berdampak secara seragam, tetapi memukul kelompok masyarakat melalui jalur yang berbeda sesuai posisi ekonomi dan ketergantungan mereka terhadap mobilitas harian. Petani sayur di Wamena mengalami penurunan pendapatan dari Rp3–4 juta per musim dengan penurunan sekitar 40–60 persen. Strategi adaptasi yang dilakukan adalah mengurangi masa tanam dan membatasi aktivitas di kebun. Konflik mengubah logika produksi rumah tangga, dimana keputusan ekonomi tidak lagi ditentukan oleh potensi hasil panen, tetapi juga oleh pertimbangan keamanan, waktu tempuh, dan risiko gagal menjual hasil panen.

Pada pedagang pasar di Wamena, dampak konflik terlihat langsung pada sirkulasi uang harian. Pendapatan yang sebelumnya Rp5–6 juta per bulan turun sekitar 35 persen. Pedagang memilih menutup kios lebih awal, terutama pada malam hari, serta mengurangi frekuensi pembelian stok barang. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan kecil sangat sensitif terhadap ketidakpastian keamanan. Kerugian ekonomi tidak selalu berupa penutupan usaha, tetapi lebih banyak terlihat pada berkurangnya intensitas aktivitas, penurunan stok, dan penyempitan waktu berdagang sehingga ekonomi bergerak lebih lambat dan lebih rapuh. Pada buruh bangunan proyek di Nduga, dampaknya lebih tajam karena pendapatan mereka bergantung pada kelancaran proyek dan keamanan lokasi kerja. Pendapatan berkurang hingga setengah dan proyek dapat tertunda selama 2–3 bulan. Penundaan proyek tidak hanya mengurangi penghasilan buruh, tetapi juga menghambat perputaran ekonomi lokal seperti transportasi, jasa kecil, konsumsi harian, dan penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan fisik dan stabilitas keamanan saling bergantung.

Sementara itu, pada kelompok PNS dan guru di Jayawijaya, dampak konflik lebih bersifat institusional. Meskipun gaji tetap diterima, absensi meningkat hingga 20 persen dan sebagian guru enggan meninggalkan rumah dinas. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik telah memengaruhi pelayanan pendidikan dan kapasitas negara dalam memberikan layanan publik secara konsisten. Secara keseluruhan, seluruh kelompok merespons konflik dengan mengurangi eksposur terhadap risiko. Logika yang berkembang bukan lagi logika berkembang, tetapi logika bertahan, sehingga aktivitas ekonomi menjadi semakin sensitif terhadap ancaman keamanan.

3.2.2 Batas Jenuh Adaptasi Terhadap Konflik

Konflik tidak hanya memengaruhi ekonomi, tetapi juga mengganggu pendidikan, kesehatan, dan mobilitas sosial jangka panjang. Sekolah dan puskesmas di wilayah rawan sering tutup sementara ketika terjadi insiden besar. Akibatnya, angka partisipasi sekolah menurun sekitar 15–20 persen karena orang tua enggan mengizinkan anak bepergian jauh. Akses kesehatan juga menurun karena masyarakat

membatasi perjalanan ke wilayah yang dianggap tidak aman. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas KKB menghambat pembangunan manusia dan memperburuk kemiskinan struktural yang telah ada sebelumnya. Konflik telah berkembang menjadi tekanan yang memaksa keluarga melakukan penyesuaian permanen terhadap cara memperoleh penghidupan, mengatur pengeluaran, dan menilai risiko mobilitas. Dalam kondisi tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan indeks pembangunan manusia yang rendah, kapasitas bertahan masyarakat sangat bergantung pada ruang aman yang terbatas dan jaringan sosial yang rapuh. Oleh karena itu, strategi adaptasi masyarakat tidak dapat menjadi solusi jangka panjang karena justru menguras sumber daya keluarga yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan kegiatan produktif.

Dari sisi kebijakan, pemerintah daerah perlu memberikan perlindungan pada titik-titik kehidupan dasar seperti sekolah, puskesmas, dan jalur distribusi barang pokok. Pendidikan dan kesehatan tidak dapat dikelola dengan pola layanan rutin karena ruang operasionalnya berada di wilayah yang sewaktu-waktu dapat terganggu konflik. Pemerintah perlu membangun koridor layanan yang aman, layanan bergerak, serta penyesuaian jadwal pelayanan berdasarkan kondisi lapangan.

Pada tingkat tata kelola, batas adaptasi masyarakat menunjukkan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, dan pelaku ekonomi lokal. Diperlukan sistem peringatan dini, jalur komunikasi cepat, dan pembagian peran yang jelas hingga tingkat distrik. Adaptasi masyarakat bukan hanya persoalan bagaimana bertahan, tetapi bagaimana negara mengubah pola bertahan tersebut menjadi sistem perlindungan yang lebih permanen. Tanpa hal tersebut, masyarakat akan terus menanggung biaya konflik dalam bentuk berkurangnya akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi.

3.2.3 Penguatan Kebijakan Daerah Berbasis Perlindungan Layanan Dasar dan Tata Kelola Konflik Sensitif

Tingkat kemiskinan Papua Pegunungan yang masih mencapai 30,03 persen pada Maret 2025 dan IPM sebesar 54,91 menunjukkan bahwa fondasi kesejahteraan masyarakat masih rapuh. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah perlu berfokus pada perlindungan layanan dasar seperti sekolah, puskesmas, pasar, dan jalur distribusi yang menghubungkan kampung dengan pusat layanan. Data Komnas HAM tahun 2024 yang mencatat 113 peristiwa HAM di Papua, dimana 85 di antaranya terkait konflik bersenjata dan kekerasan, menunjukkan bahwa konflik telah berdampak langsung pada keberlangsungan layanan dasar masyarakat. Pemerintah daerah perlu beralih dari pola respons pascakejadian menuju perlindungan prakejadian melalui penyediaan akses aman ke pendidikan dan kesehatan, penjadwalan layanan yang peka terhadap risiko, serta jaminan kehadiran aparatur di lapangan. Jika tidak, strategi adaptasi masyarakat akan terus menguras sumber daya keluarga dan memperdalam kerentanan sosial ekonomi.

Dari sisi operasional, kondisi geografis Papua Pegunungan yang terpencil dan bergantung pada transportasi udara menuntut model pelayanan yang lebih fleksibel. Pemerintah daerah perlu mengembangkan layanan kesehatan bergerak, sekolah bergerak, penempatan stok logistik pada titik aman, serta sistem distribusi yang tidak bergantung pada satu jalur. Selain itu, koordinasi lintas sektor perlu diperkuat karena gangguan KKB sering berdampak pada berbagai sektor secara bersamaan. Penguatan kebijakan harus didasarkan pada prinsip konflik sensitif sehingga perlindungan layanan dasar menjadi bagian dari desain pembangunan, bukan sekadar respons setelah situasi memburuk. Dalam tata kelola ekonomi lokal, pemerintah daerah juga perlu melindungi jalur ekonomi strategis, menjamin ketersediaan stok barang pokok, serta memberikan pengamanan terhadap aktivitas ekonomi yang melibatkan pelaku usaha kecil. Gangguan terhadap pasar, jalan, dan bandara terbukti langsung memengaruhi rasa aman dan keputusan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, fokus kebijakan tidak

hanya pada pemulihan infrastruktur fisik, tetapi juga pada pemulihan kepercayaan pelaku ekonomi agar aktivitas perdagangan dan distribusi dapat kembali berjalan normal.

Pada tingkat institusional, penguatan kebijakan perlu diarahkan pada pemulihan kepercayaan antara masyarakat dan negara. Pemerintah daerah perlu membentuk forum kerja tetap yang melibatkan aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, pelaku pasar, dan pemimpin komunitas sebagai mekanisme deteksi dini, penentuan jalur aman, dan penyesuaian layanan publik di wilayah rawan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan juga harus diperkuat agar pengalaman warga terdampak konflik menjadi dasar penyusunan program. Dengan demikian, penguatan kebijakan daerah menjadi jalan keluar dari batas adaptasi masyarakat, sehingga perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dapat bergerak dari pola bertahan menuju pemulihan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data kualitatif mengenai persepsi masyarakat terhadap aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Provinsi Papua Pegunungan, ditemukan bahwa gangguan keamanan tidak sekadar menjadi residu konflik politik, melainkan faktor struktural yang secara langsung menghentikan siklus produksi dan distribusi ekonomi lokal. Bagian ini mendiskusikan bagaimana temuan lapangan tersebut berdialog, memperkuat, atau menyanggah temuan-temuan dari peneliti terdahulu. Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adamu dan Abdullahi (2021) di Zamfara State, Nigeria, yang menyatakan bahwa konflik bersenjata regional selalu berdampak linier terhadap penurunan aktivitas ekonomi masyarakat, penurunan pendapatan, dan terganggunya sektor pertanian lokal. Temuan empiris di Yahukimo dan Pegunungan Bintang mengonfirmasi hal tersebut secara mutlak, di mana pendapatan rumah tangga tani sayur di Wamena anjlok hingga 40-60% akibat ketakutan terhadap intensitas *sweeping* dan penembakan yang dilakukan KKB di sekitar area kebun mereka. Hal ini membuktikan secara universal bahwa komoditas subsisten di daerah konflik memiliki kerentanan yang sama tinggi terlepas dari perbedaan benua dan latar belakang etnis kelompok bersenjata tersebut.

Selanjutnya, sejalan dengan hasil kajian Freedman dan Owens (2016) serta Osawe (2015) yang menegaskan bahwa tingkat kriminalitas dan kekerasan bersenjata di suatu wilayah meningkatkan ketidakpastian usaha (*business uncertainty*) serta menaikkan biaya ekonomi secara eksponensial , temuan penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas KKB mengubah lanskap pasar tradisional di Papua Pegunungan menjadi "ruang penuh perhitungan risiko". Pedagang terpaksa melakukan tindakan defensif dengan memotong jam operasional dan mengurangi stok barang secara drastis untuk menghindari kerugian penjarahan. Hal ini memperkuat teori bahwa dalam ekosistem konflik, pelaku ekonomi kecil tidak lagi bergerak berdasarkan prinsip maksimasi keuntungan (*profit maximization*), melainkan beralih ke prinsip pengamanan minimum (*risk minimization*).

Penurunan ritme ekonomi dan pergeseran logika bertahan pelaku usaha mikro di Papua Pegunungan ini semakin memperkuat tesis global mengenai warisan ekonomi di wilayah konflik sebagaimana diungkapkan oleh Collier dan Duponchel (2013) serta Justino (2013). Temuan empiris penelitian ini mengonfirmasi argumen Justino (2013) bahwa dalam situasi konflik bersenjata, sektor pertanian dan mata pencaharian masyarakat subsisten akan mengalami guncangan ganda akibat pembatasan mobilitas kebun dan disrupsi rantai pasok. Ketakutan kolektif yang dialami petani dan pedagang di Wamena memaksa mereka mengubah alokasi tenaga kerja dan modal ke titik paling minimal. Kondisi ini sejalan dengan bukti level mikro dari Collier dan Duponchel (2013) yang menyatakan bahwa konflik berkepanjangan secara sistemik menurunkan kapasitas operasi pelaku usaha lokal akibat hilangnya jaminan keamanan, rusaknya infrastruktur penghubung, serta tingginya biaya transaksi yang harus ditanggung secara mandiri oleh komunitas. Dengan demikian, hambatan

pembangunan ekonomi di Papua Pegunungan bukan lagi sekadar masalah teknis-fiskal, melainkan cerminan dari lumpuhnya institusi pasar akibat penetrasi kekerasan bersenjata.

Namun demikian, temuan penelitian Praja ini menunjukkan diferensiasi yang jelas dan berbeda dengan temuan penelitian makro dari Chandra et al. (2024) dan Sarjito (2024). Jika dalam penelitian mereka konflik Papua selalu dicitrakan sebagai perlawanan ideologis-teritorial terhadap aparatur negara (TNI/Polri) pada level makro , temuan lapangan Praja menunjukkan adanya pergeseran logika perang KKB yang kini secara sengaja menyasar simpul-simpul ekonomi harian sipil dan fasilitas pelayanan dasar. Penembakan tukang ojek di Pegunungan Bintang, pembakaran sekolah di Yahukimo, hingga penembakan pesawat kargo sipil merupakan bukti konkrit bahwa ruang subsisten dan ruang mobilitas masyarakat sengaja dilumpuhkan oleh KKB untuk memutus kendali pembangunan oleh negara. Terakhir, temuan mengenai kapasitas adaptif masyarakat lokal dalam penelitian ini memperkaya sekaligus memberikan antitesis implisit terhadap kesimpulan Widiprana (2022) yang menyatakan bahwa intervensi pembangunan di Papua sering kali stagnan dan tidak berkorelasi dengan kesejahteraan karena masalah efektivitas dana Otsus. Penelitian Praja menemukan bahwa di tengah lumpuhnya proyek fisik akibat teror terhadap buruh konstruksi , terdapat modal sosial berupa penguatan solidaritas komunitas lokal dan strategi ketahanan berbasis ketahanan pangan adat (*local resilience*) yang membuat denyut ekonomi lokal tidak sepenuhnya mati. Temuan ini menegaskan bahwa variabel intervensi keamanan jauh lebih mendesak dipulihkan terlebih dahulu daripada sekadar menambah instrumen fiskal daerah otonomi baru.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menarik lainnya dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun aktivitas KKB menjadi faktor penghambat utama pembangunan ekonomi melalui gangguan keamanan, terhambatnya distribusi barang, tingginya biaya logistik, serta terganggunya layanan pendidikan dan kesehatan, masyarakat Papua Pegunungan tetap menunjukkan kemampuan adaptasi yang kuat. Petani, pedagang, buruh, dan aparatur pemerintah menyesuaikan pola aktivitas dengan mengurangi mobilitas, memilih jalur yang lebih aman, serta menyesuaikan jam kerja untuk mempertahankan keberlangsungan ekonomi. Di sisi lain, dukungan berupa solidaritas sosial masyarakat, koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh adat, dan tokoh agama menjadi faktor pendukung yang membantu menjaga aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar tetap berjalan di tengah situasi konflik. Namun, temuan ini juga memperlihatkan adanya batas adaptasi masyarakat, di mana strategi bertahan yang dilakukan lebih berorientasi pada mempertahankan keberlangsungan hidup daripada mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dipersepsikan oleh masyarakat, pelaku ekonomi, dan pemerintah daerah sebagai faktor yang menghambat pembangunan ekonomi lokal di Provinsi Papua Pegunungan karena mengganggu mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, keberlangsungan usaha, serta pelaksanaan proyek pembangunan, yang berdampak pada meningkatnya biaya ekonomi dan menurunnya produktivitas. Namun demikian, masyarakat dan pemerintah daerah tetap menunjukkan kemampuan adaptasi melalui penyesuaian pola aktivitas ekonomi, penguatan solidaritas sosial, serta berbagai upaya untuk mempertahankan keberlanjutan penghidupan dan pembangunan di tengah kondisi keamanan yang tidak stabil.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah dan jumlah informan yang terbatas di Provinsi Papua Pegunungan. Selain itu, kondisi keamanan akibat aktivitas KKB menyebabkan proses pengumpulan data tidak dapat menjangkau seluruh wilayah terdampak secara optimal.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian pada beberapa kabupaten terdampak KKB di Papua serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak keamanan terhadap pembangunan ekonomi lokal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan beserta seluruh informan dan pihak terkait yang telah memberikan kesempatan, data, serta dukungan selama pelaksanaan penelitian. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing, keluarga, sahabat, dan semua pihak yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Agustus, F. S., Andoko, D., Muniasari, M., Savitri, C. M., Nurisnaeny, P. S., & Maya, H. B. (2025). Strengthening the Papua Steering Committee strategy: Reducing instability for accelerated development in Papua, Indonesia. Social Sciences & Humanities Open, 11, 101413. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101413

Ahmad, A., Ali, S., & Ahmad, N. (2014). Crime and economic growth in developing countries: Evidence from Pakistan. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 4(4), 31–41. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2421086

Amanda, M. R., & Pramono, B. (2023). Resolusi konflik kelompok kriminal bersenjata Papua. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(1). https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2855

Azzaki, A. H. (2025). Dual klaim lahan sebagai sumber konflik proyek strategis nasional di Nagari Air Bangis: Analisis konflik agraria. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 51(2). https://ejournal.ipdn.ac.id/JIPWP/article/view/5839

Az., L. S. (2016). Negara hukum dan demokrasi: Pasang surut negara hukum Indonesia pasca reformasi. IAIN Po Press.

Boediono. (2002). Ekonomi mikro: Seri sinopsis pengantar ilmu ekonomi. BPFE.

Chandra, A. A., Sukendro, A., Uksan, A., Widodo, P., & Anas, M. R. F. (2024). Analysis of causes and intervention design for the Papua conflict based on structural, accelerator, and trigger (SAT) model. International Journal of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS), 4(3). https://doi.org/10.55227/ijhess.v4i3.1205

Collier, P., & Duponchel, M. (2013). The economic legacy of civil war: Firm-level evidence from Sierra Leone. *Journal of Conflict Resolution*, 57(1), 65-88. https://doi.org/10.1177/0022002712446124

Ediyono, S., & Syahputra, M. A. (2024). Kebijakan hukum negara Indonesia mengenai tindakan terorisme yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 6(2). https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v6i2.5077

Firman, & Sofian, M. (2025). Otonomi khusus Papua dari perspektif politik afirmasi orang asli Papua di pemerintahan. Jurnal Pemerintahan dan Politik, 10(3). https://doi.org/10.36982/jpp.v10i3.5797

Freedman, M., & Owens, E. G. (2016). Your friends and neighbors: Localized economic development and criminal activity. The Review of Economics and Statistics, 98(2), 233–253. https://www.jstor.org/stable/43830345

Irfan, A., Ramadhanti, N., Irfansyah, A., Azzahra, P. F., Saufi, M., & Firmansyah, L. D. (2024). Pengkerdilan tindakan aparat terhadap KKB Papua: Dilema penegakan HAM dalam kasus KKB Papua. In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 13(1). https://doi.org/10.14421/inright.v13i1.3574

Jonathan, O. E., Olusola, A. J., Bernadin, T. C. A., & Inoussa, T. M. (2021). Impacts of crime on socio-economic development. Mediterranean Journal of Social Sciences, 12(5), 71–81. https://doi.org/10.36941/mjss-2021-0045

Justino, P. (2013). Livelihoods and poverty amid violent conflict: the role of agriculture. *World Development*, 43, 212-221. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.10.013

Kossay, M. (2022). Conceptual study of central government policies in resolving the Papua conflict in Indonesia (Papua special autonomy perspective). International Journal of Environmental, Sustainability and Social Science, 3(3). https://doi.org/10.38142/ijesss.v3i3.237

Lamere, M. (2024). Dampak otonomi khusus pada pembangunan ekonomi di Papua. Journal of Governance and Local Politics, 6(2). https://doi.org/10.47650/jglp.v6i2.1548

Lani, P., Batiar, P., & Rante, H. (2024). Analisis pemeliharaan jalan trans Papua di Kabupaten Yalimo Provinsi Papua Pegunungan. Jurnal ELIPS, 7(1). https://doi.org/10.31957/jurnalelips.v7i1.4122

Ndraha, A. B., & Uang, D. P. (2018). Strategi pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara. J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan), 3(2), 137–149. https://ejournal.ipdn.ac.id/JPDPP/article/view/867

Osawe, C. O. (2015). Increase wave of violent crime and insecurity: A threat to socio-economic development in Nigeria. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 20(1), 123–133. https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=3568770

Pamungkas, C. (2015). Sejarah lisan integrasi Papua ke Indonesia: Pengalaman orang Kaimana pada masa Trikora dan Pepera. Paramita: Historical Studies Journal, 25(1). https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/paramita/article/view/3423

Pasaribu, J. P., Ismail, D. E., & Towadi, M. (2023). Upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua (Studi komparasi dengan kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh). Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, 1(4). https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa/article/view/1419

Putri, S. N., Utomo, M. F. N., Erlangga, R. W., & Hikmah, N. (2022). Analisis hubungan antara kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua dengan pelanggaran hak asasi manusia. Al-Hakam: Islamic Law and Contemporary Issues, 3(2). https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ilj/article/view/16040

Raharjo, M. M. (2021). Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Cet. 1). Yogyakarta: Gava Media. https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=15388

Sa'diyah, K. (2022). The journey of two decades of special autonomy in resolving security issues in Papua. Social Science Studies, 2(5). https://doi.org/10.47153/sss25.4652022

Sarjito, A. (2024). Human rights violations: The entry point for international troops into Papua. Society, 12(1). https://societyfisipubb.id/index.php/society/article/view/665

Simamora, A. R., Junaedi, A. L., Ruhiyat, A. H., Sihaloho, C. L., Gultom, C. M. K., Sinaga, D. A., Maharani, K. A., Illahi, W. A., & Mulyadi, M. (2025). Dilema penegakan hukum dan HAM: Kajian kasus pelanggaran oleh KKB-OPM dari perspektif hukum dan HAM. Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, 2(3). https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Mahkamah/article/view/759

Sinen, K. (2025). Kebijakan dan implementasi otonomi khusus di Papua Barat Daya. Jurnal Scientific of Mandalika (JSM), 6(4), 961–970. https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jomla/article/view/4454

Sofyan, A., & Putri, A. P. (2024). Peran pemerintah terhadap kasus hak asasi manusia (HAM) masyarakat Papua pegunungan. Equality Before the Law, 4(2). https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5011273

Suaib. (2017). Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat: Buku literatur IPDN Tahun 2017 (Cet. 1). Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri. https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=27231

Subagyo, A. (2018). Sinergi TNI AD dengan Polri dan pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial di Kota Tarakan. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja. https://ejournal.ipdn.ac.id/JIWBP/article/view/284

Sufajar, R., Sadiyatunnimah, S., Muqaddim, & Cheguevara, C. (2025). A special autonomy: A comparative study of the Papua and Aceh conflict in the perspective of special autonomy. Jurnal Studi Pemerintahan dan Sosial, 6(4). https://e-journal.unas.ac.id/jsps/article/view/334

Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif. Alfabeta.

Wahidah, T. H., Pamungkas, A. T., & Amanusa, N. F. (2025). Indonesia's commitment to combating the crime of terrorism through diplomatic communication and global development cooperation: Papua KKB case study. Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities, 14(2). https://ejournal.brin.go.id/jissh/article/view/9767

Widiprana, R. B. (2022). Analisis pengaruh dana otonomi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap produk domestik regional bruto pada kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat. Jurnal Lensa Ekonomi, 16(2). https://doi.org/10.30862/lensa.v16i02.246

Zahidi, M. S., & Bin Othman, M. F. (2024). Human rights issue in Papua: A systematic literature review. UNISCI Journal, 22(65), 107–126. https://doi.org/10.31439/UNISCI-203

Zam, M. A. Z., & Himmawan, D. (2023). Manajemen konflik dalam penyelesaian kasus Papua. Diplomasi: Jurnal Demokrasi, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, 1(1). https://doi.org/10.58355/dpl.v1i1.10